



Faktor Determinan Terjadinya Pencabulan dan Pelecehan terhadap Perempuan

Ciek Julyati Hisyam

Universitas Negeri Jakarta

Benedictus Raditya

Universitas Negeri Jakarta

Hernan Solari

Universitas Negeri Jakarta

Ilham Danu Prasetyo

Universitas Negeri Jakarta

Muhammad Fauzil Adhim

Universitas Negeri Jakarta

Nasrani Nofati Waruwu

Universitas Negeri Jakarta

Roberto Dowansiba

Universitas Negeri Jakarta

Alamat: Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Korespondensi penulis : cjhisyam@unj.ac.id

Abstract. *Sexual assault and harassment against women are forms of gender-based violence that have become serious issues in various countries, both developing and developed. This problem involves not only individual aspects but also results from discriminatory social norms that place women in subordinate positions. Social stigma often serves as a barrier for victims to report incidents, while patriarchal culture exacerbates gender injustice. The psychological impact on victims is significant, causing trauma that disrupts mental health. Women's financial dependence also contributes to the difficulty of fighting violence, perpetuating this cycle. Additionally, the development of technology and social media has created new forms of harassment, such as cyber harassment, which are becoming increasingly complex. A lack of digital literacy makes women vulnerable targets. Therefore, there is a need for an approach that integrates education, legal reform, and social support to address this issue. Efforts to empower women and prevent gender-based violence must be designed to involve all layers of society and address the root causes of gender inequality.*

Keywords: *Sexual Assault, Harassment, Gender, Patriarchy, Inequality*

Abstrak. Pencabulan dan pelecehan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi isu serius di berbagai negara, baik berkembang maupun maju. Masalah ini tidak hanya melibatkan aspek individu, tetapi juga merupakan hasil dari norma sosial diskriminatif yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Stigma sosial sering menjadi penghalang bagi korban untuk melapor, sementara budaya patriarki memperburuk ketidakadilan gender. Dampak psikologis bagi korban sangat besar, menyebabkan trauma yang mengganggu kesehatan mental. Ketergantungan finansial perempuan juga berkontribusi pada kesulitan melawan kekerasan, sehingga siklus ini terus berulang. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial menciptakan bentuk pelecehan baru, seperti cyber harassment, yang semakin kompleks. Kurangnya literasi digital membuat perempuan rentan menjadi sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang menyatukan pendidikan, reformasi hukum, dan dukungan sosial untuk mengatasi isu ini. Upaya pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender harus dirancang agar melibatkan semua lapisan masyarakat, serta mengatasi akar masalah ketidaksetaraan gender.

Kata kunci: Pencabulan, Pelecehan, Gender, Patriarki, Ketidaksetaraan

LATAR BELAKANG

Pencabulan dan pelecehan terhadap perempuan adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi masalah serius di berbagai negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, menunjukkan bahwa masalah ini melampaui tingkat kemajuan ekonomi dan sosial. Banyak yang menganggap pencabulan dan pelecehan sebagai persoalan individu, padahal sebenarnya merupakan akibat dari norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan (Siregar, 2024).

Masalah ini mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Dari sisi sosial, stigma sering menghalangi korban melapor atau mendapatkan keadilan. Budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat memperburuk ketidakadilan gender, di mana perempuan sering diperlakukan sebagai objek (Supanto, 2004). Dari sisi ekonomi, ketergantungan finansial sering membuat perempuan sulit melawan atau melaporkan tindakan pencabulan yang dialaminya, sehingga kekerasan ini terus berulang (Umniyyah, 2021).

Dampak psikologis juga tidak bisa diabaikan. Banyak korban mengalami trauma yang berat, yang mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya dukungan psikologis serta layanan rehabilitasi yang memadai (Watson, 2023). Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang menyatukan aspek pendidikan, reformasi hukum, dan dukungan sosial untuk menangani masalah ini secara efektif.

Menyadari bahwa pencabulan dan pelecehan adalah isu yang rumit dan melibatkan banyak dimensi, strategi pemberdayaan perempuan serta pencegahan kekerasan berbasis gender harus dirancang secara inklusif untuk diterapkan di semua lapisan masyarakat. Upaya ini harus dimulai dari mengatasi akar masalah ketidaksetaraan gender yang berakar dalam budaya patriarki.

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan telah lama mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Budaya patriarki yang mendominasi banyak komunitas menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Pelecehan ini tidak hanya terjadi dalam keluarga dan rumah tangga, tetapi juga sudah menjadi budaya masyarakat (Sopariyah & Khairunnisa, 2024). Ketidaksetaraan gender bukan sekadar masalah individu, melainkan isu struktural yang sistematis.

Dominasi budaya patriarki membuat perempuan sering dianggap sebagai kelas kedua. Budaya patriarki memberi dampak besar terhadap kehidupan perempuan (Swari, 2023). Dalam situasi ini, perempuan tidak hanya kehilangan suara dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sering diabaikan dalam berbagai aspek seperti pendidikan dan pekerjaan.

Stereotip gender dan praktik diskriminasi semakin memperburuk keadaan. Stereotip yang menggambarkan perempuan sebagai makhluk lemah dan emosional menyulitkan mereka untuk mendapatkan peluang yang setara. Pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat mereka terbelenggu dan mengalami

diskriminasi (Facio, 2013). Hal ini menciptakan siklus ketidaksetaraan yang sulit dihentikan.

Ketimpangan gender yang berakar dari budaya patriarki, ditambah stereotip dan diskriminasi, menciptakan lingkungan yang membatasi perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya di masyarakat. Mengubah pandangan ini menjadi langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Tantangan ini semakin diperburuk oleh kemunculan bentuk-bentuk pelecehan baru di era digital.

Perkembangan teknologi dan media sosial di era digital telah menciptakan bentuk pelecehan baru, seperti cyber harassment, yang semakin rumit. Kemudahan akses ke konten pornografi memungkinkan individu dengan mudah terpapar pada materi yang merendahkan perempuan. Konten semacam ini tidak hanya memperkuat stereotip gender, tetapi juga mendorong perilaku predatoris di dunia maya. Perempuan sering menjadi objek pelecehan seksual dan eksploitasi seksual (Tutrianto & Nizar, 2021).

Selain itu, anonimitas yang ditawarkan oleh platform media sosial memberi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pelecehan tanpa takut terdeteksi. Situasi ini semakin buruk karena pelaku merasa bebas mengekspresikan perilaku yang tidak pantas. Kekerasan berbasis gender online mengalami peningkatan yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa dunia digital menjadi tempat yang semakin berbahaya bagi perempuan (Vranjes et al., 2020).

Kurangnya literasi digital juga memperburuk masalah ini. Banyak pengguna, khususnya perempuan, yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang cara melindungi diri mereka di dunia maya. Ketidapahaman ini membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku cyber harassment. Pendidikan mengenai literasi digital sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan mempersiapkan individu menghadapi potensi risiko di ruang digital.

Mengatasi pengaruh teknologi dan media sosial terhadap pelecehan perempuan menjadi langkah utama dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.

Faktor ekonomi memiliki peran besar dalam terjadinya kekerasan rumah tangga, terutama melalui ketergantungan finansial perempuan. Akses yang terbatas ke pendidikan dan pekerjaan sering kali membuat perempuan berada dalam posisi rentan. Ketergantungan ini menciptakan situasi di mana mereka sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi membuat banyak perempuan berada dalam posisi rentan dan bergantung pada pihak lain (Sinaga, 2022).

Pelaku kekerasan sering memanfaatkan ketergantungan ini untuk melancarkan aksinya. Dalam relasi kekuasaan, pelaku menggunakan dominasi finansial untuk mengendalikan korban. Misalnya, dalam hubungan kerja, pelaku yang memiliki posisi superior dapat mengeksploitasi ketergantungan finansial pekerja, menciptakan lingkungan yang penuh ancaman dan tidak aman bagi korban. Situasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksi kejahatan, terutama dalam hubungan kerja atau relasi kekuasaan lainnya (Conner, 2013).

Memahami bagaimana faktor ekonomi dan ketergantungan finansial memengaruhi kekerasan rumah tangga sangat diperlukan. Kebijakan yang mendukung akses perempuan ke pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu memutus siklus kekerasan ini. Upaya preventif, termasuk intervensi untuk mengurangi ketergantungan finansial serta meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Hal ini perlu diimbangi dengan perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap isu gender.

Kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia terkait perlindungan perempuan masih sangat terlihat, terutama pada sistem hukum yang belum responsif terhadap isu gender. Meskipun regulasi perlindungan perempuan sudah ada, penerapannya di lapangan masih lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang tidak memadai dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Lemahnya penegakan hukum ini membuat praktik pencabulan dan pelecehan terhadap perempuan terus terjadi (Lubis & Triadi, 2024).

Selain itu, stigma sosial menjadi hambatan besar bagi korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Banyak korban merasa tertekan oleh pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan mereka, sehingga memilih untuk tidak mengambil langkah hukum. Trauma psikologis akibat kekerasan juga sering membuat korban kehilangan keberanian untuk melapor. Proses hukum yang panjang dan melelahkan semakin memperburuk keadaan. Hal ini menciptakan fenomena gunung es dalam statistik kekerasan berbasis gender, di mana banyak kasus tidak dilaporkan (Agustanti & Waluyo, 2023). Proses hukum yang berbelit-belit menciptakan kesan bahwa keadilan sulit dicapai, sehingga korban semakin enggan melaporkan kasus mereka (Rahman, 2024).

Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan efektif, diperlukan kolaborasi berbagai pihak. Langkah-langkah ini meliputi penghapusan stigma sosial, penguatan implementasi kebijakan perlindungan perempuan, dan peningkatan proses hukum agar lebih ramah bagi korban. Hanya melalui upaya ini perempuan dapat menerima perlindungan yang seharusnya, serta keadilan dapat ditegakkan secara maksimal (Roem et al., 2024).

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori Mobilitas Sosial (H. Edward Ransford) dan Teori Interaksionisme Simbolik (George Herbert Mead) untuk meneliti faktor yang memengaruhi pencabulan dan pelecehan terhadap perempuan. Mobilitas sosial merujuk pada perubahan status sosial seseorang dalam struktur masyarakat yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Ransford menyatakan bahwa perpindahan ini bisa naik, turun, atau tetap dalam hirarki sosial, biasanya untuk memperbaiki hidup (Shindita & Mukaromah, 2020). Ketika individu dengan status rendah mendapatkan posisi lebih tinggi, mereka mungkin merasa berkuasa dan melakukan tindakan negatif, seperti pelecehan seksual. Ini menunjukkan bahwa status sosial berkontribusi pada perilaku individu, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu, Teori Interaksionisme Simbolik menyoroti peran simbol dan makna dalam interaksi sosial. Mead menjelaskan bahwa simbol-simbol dapat menciptakan makna yang memicu interaksi sosial (Pitaloka & Putri, 2021). Pada kasus pelecehan, tindakan seperti pelecehan verbal sering dianggap "normal" oleh pelaku, meskipun korban merasakan dampak berbeda. Hal ini menggambarkan bagaimana makna dalam interaksi sosial dapat memperkuat perilaku buruk.

Selain itu, penelitian menunjukkan perlunya komunikasi yang baik antara individu untuk menghindari salah tafsir terhadap pesan yang disampaikan (Arawinda, 2021). Oleh karena itu, dengan memahami dinamika mobilitas sosial dan interaksi simbolik, kami dapat mengidentifikasi penyebab tindakan pelecehan dan menyusun strategi pencegahan yang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mencari tahu faktor-faktor yang memengaruhi pencabulan dan pelecehan terhadap perempuan. Penelitian ini diawali dengan studi literatur yang menggunakan sumber dari berbagai jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku nasional maupun internasional. Pendekatan ini bertujuan menggali konsep teoritis dan data empiris yang relevan, serta beragam pandangan yang sudah ada terkait topik ini. Penelitian kualitatif dirancang untuk menggali fenomena secara mendalam melalui data yang diperoleh dari latar alami (Fadli, 2021).

Setelah studi literatur, penelitian dilanjutkan dengan wawancara terhadap narapidana yang dihukum atas kasus pelecehan terhadap perempuan. Wawancara ini bertujuan mendapatkan perspektif langsung mengenai motivasi dan faktor psikologis pelaku. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur untuk mencari tahu narasi pelaku secara fleksibel namun tetap terarah. Pendekatan ini membantu peneliti memahami dinamika perilaku pelaku dan faktor rehabilitasi yang mungkin berpengaruh (Rachmawati, 2007).

Subjek penelitian adalah seorang pria berusia 40 tahun yang memiliki pengalaman melakukan pelecehan seksual. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, memungkinkan peneliti memilih pelaku sesuai kriteria yang telah ditentukan. Fokusnya pada individu dengan pengalaman kekerasan seksual agar data yang diperoleh dapat memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang mendorong tindakan tersebut.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian sebelumnya serta menciptakan kerangka analisis yang lebih kuat untuk data yang dikumpulkan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menggali makna dan pengalaman yang dihadapi pelaku dan korban dalam kekerasan seksual (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual sebagai Masalah Struktural

Kekerasan seksual masih sering terjadi di masyarakat dan menjadi sumber keresahan, terutama bagi perempuan dan anak. Berdasarkan data Komnas Perempuan,

jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mencapai angka yang mengkhawatirkan. Meski kesadaran tentang isu ini semakin meningkat, tindakan kekerasan seksual tetap meluas dan sering kali tidak dilaporkan. Selain itu, perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban (Dwiyanti, 2017).

Menurut Judith Berman, kekerasan seksual meliputi segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik verbal maupun fisik, yang dianggap merendahkan, menghina, mengintimidasi, atau memaksa (Dwiyanti, 2017). Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga perilaku seperti komentar atau sindiran yang merendahkan.

Salah satu penyebab utama kekerasan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sistem patriarki menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi, menciptakan ketimpangan yang dimanfaatkan pelaku di berbagai lingkungan, seperti tempat kerja atau institusi pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dominasi yang digunakan untuk menindas perempuan (Alhakim, 2021).

Kekerasan seksual berdampak fisik dan psikologis pada korban. Banyak korban mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, hingga rasa malu yang berkepanjangan. Sebuah studi melaporkan bahwa lebih dari 55% perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja memilih mengundurkan diri akibat dampak traumatis tersebut (Ginting et al., 2022). Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak kekerasan seksual terhadap kehidupan korban.

Melalui pendekatan sosiologis, kekerasan seksual dapat dilihat sebagai produk dari struktur sosial dan norma yang berlaku. Sistem patriarki dan nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat berkontribusi pada tingginya angka kekerasan seksual. Hal ini mempertegas bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, melainkan persoalan struktural yang memerlukan perhatian bersama (Al Rahman, 2019).

Memahami Faktor Pemicu Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Pada 26 November, tepatnya hari Selasa, kelompok kami melakukan kunjungan ke salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jakarta Timur. Kunjungan ini diawali dengan tur singkat untuk melihat kondisi di dalam Lapas, yang dipandu oleh petugas kepolisian setempat. Observasi ini memberikan gambaran mengenai suasana dan fasilitas yang ada di Lapas. Setelah itu, kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan narasumber, seorang pelaku tindak kekerasan seksual bernama Maman.

Tabel 1. Data Informan

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Kasus	Lama Masa Hukuman
(S) atau Maman	Laki-laki	40 Tahun	Pelecehan Seksual terhadap Perempuan	18 Tahun

Maman, yang sebelumnya bekerja sebagai pengantar barang, menceritakan bagaimana tindakannya sering terjadi saat ia mengantar barang ke rumah korban. Melalui wawancara, ia mengungkapkan bahwa tindakannya dipicu oleh dorongan seksual yang sulit dikendalikan. Selain itu, lingkungan yang sepi atau korban yang berada sendirian di rumah menjadi faktor yang mempermudah pelaku untuk melancarkan aksinya. Pengakuan ini menunjukkan bagaimana situasi tertentu dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Pengakuan Maman memberikan gambaran mengenai pola pikir dan kondisi yang mendorong perilaku kekerasan seksual. Hal ini menyoroti perlunya langkah preventif, seperti edukasi yang lebih baik tentang kekerasan seksual dan perlindungan yang lebih ketat bagi kelompok rentan. Selain itu, wawancara ini juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika pelaku, yang dapat menjadi acuan untuk mengembangkan strategi rehabilitasi dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

Analisis Faktor-faktor determinan Pelaku Pelecehan terhadap Perempuan

Ketidaksesuaian antara pengalaman korban pelecehan seksual dan harapan sosial sangat terlihat di masyarakat yang sering menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Perhatian yang diberikan kepada perempuan sering dianggap sebagai bentuk pujian atau sanjungan. Namun, banyak perempuan justru merasa terganggu dan terhina ketika mengalami pelecehan seksual. Hal ini mencerminkan adanya norma sosial yang keliru, di mana perempuan diharapkan merasa tersanjung atas perhatian seksual, meskipun hal tersebut sering kali menimbulkan rasa tidak aman dan trauma. Penelitian menunjukkan bahwa perhatian kepada perempuan sering kali diiringi gagasan bahwa mereka seharusnya merasa tersanjung atau tidak terganggu oleh hal tersebut (Karlina & Prabowo, 2014).

Masalah ini diperparah oleh faktor sosial budaya yang mendukung pandangan patriarkal. Laki-laki sering kali mendapatkan legitimasi untuk menunjukkan perilaku seksual yang agresif. Berdasarkan pandangan Tangri, Burt, dan Johnson (dalam Wall, 1992), pelecehan seksual dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan faktor natural atau biologis. Norma yang berlaku sering mengabaikan pengalaman korban, membuat mereka sulit melawan atau melaporkan tindakan pelecehan. Hal ini menunjukkan perlunya revisi norma sosial untuk memberikan ruang bagi pengalaman perempuan yang sering diabaikan.

1. Faktor Natural (Biologis) sebagai Penyebab Pelecehan Seksual

Faktor natural atau biologis sering dianggap sebagai alasan utama terjadinya pelecehan seksual, di mana laki-laki diyakini memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini menciptakan pandangan bahwa laki-laki cenderung melakukan tindakan seksual terhadap perempuan. Banyak yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan yang sama, tetapi ketika tindakan tersebut berubah menjadi pelecehan, perempuan sering merasa terganggu dan terhina, berbeda dari anggapan bahwa mereka seharusnya merasa tersanjung (Nanda et al., 2023).

Pandangan ini juga berkaitan dengan konsumsi konten pornografi, di mana perempuan kerap digambarkan sebagai objek seksual. Dalam konten tersebut, perempuan sering ditampilkan sebagai sosok lemah dan mudah dikuasai. Teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa pelaku membentuk persepsi tentang perempuan melalui simbol-simbol yang mereka lihat dalam konten pornografi. Akibatnya, pelaku memandang perempuan sebagai objek yang bisa didominasi, merasa memiliki kekuatan untuk menguasai mereka (Karliana & Prabowo, 2014).

Selain itu, pengaruh media dan konten pornografi terhadap perilaku laki-laki dapat mengurangi empati terhadap korban. Pelaku yang sering terpapar konten semacam itu mungkin melihat pelecehan seksual sebagai sesuatu yang normal atau bisa diterima. Pola pikir ini memperkuat siklus di mana pelaku merasa berhak melakukan pelecehan, sementara perempuan tetap dilihat sebagai objek tanpa suara atau kendali (Sari, 2023).

Faktor natural atau biologis, ditambah pengaruh dari konsumsi konten pornografi, berperan besar dalam meningkatnya kasus pelecehan seksual. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan program yang mempromosikan kesetaraan gender serta menghormati hak perempuan. Upaya ini diperlukan agar perempuan tidak lagi dipandang sebagai objek dan angka pelecehan seksual dapat dikurangi.

2. Faktor Sosial Budaya sebagai Penyebab Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sering kali berakar pada sistem sosial budaya yang patriarkal, di mana laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sistem ini menciptakan ketimpangan kekuasaan, membuat laki-laki merasa berhak mendominasi, sementara perempuan diharapkan untuk bersikap pasif. Norma-norma semacam ini mendorong dominasi laki-laki dan memberikan penghargaan terhadap perilaku agresif seksual (Ahyun et al., 2022).

Perilaku agresif laki-laki sering kali didukung oleh pengakuan sosial yang menganggap mereka sebagai sosok kuat dan berani. Sebaliknya, perempuan yang melawan atau menolak dianggap melanggar norma yang berlaku. Pola pikir seperti ini memaksa laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan, sementara perempuan dipaksa menyesuaikan diri dengan peran yang telah ditetapkan. Akibatnya, perempuan kerap dianggap sebagai objek yang dapat dimanfaatkan, mencerminkan kuatnya budaya patriarki (Karliana & Prabowo, 2014).

Norma sosial yang mendukung dominasi laki-laki berperan besar dalam mendorong terjadinya pelecehan seksual. Sebuah studi menunjukkan bahwa pelaku merasa memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut karena perempuan dilihat sebagai objek (Sulaeman et al., 2022). Penghargaan terhadap perilaku agresif laki-laki ini menciptakan lingkungan yang memudahkan terjadinya kekerasan seksual.

Perempuan yang hidup di bawah sistem ini sering merasa tertekan untuk tidak melawan meskipun mereka mengalami ketidaknyamanan. Norma yang menuntut perempuan untuk tetap pasif membuat banyak dari mereka khawatir akan menghadapi stigma atau tindakan balasan jika melawan (Ahyun et al., 2022). Hal ini menunjukkan

bahwa pelecehan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi hasil dari ketimpangan struktur sosial yang mendukung dominasi laki-laki atas perempuan.

Sistem patriarki, norma sosial yang memperkuat dominasi laki-laki, dan penghargaan terhadap agresi seksual saling berkaitan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan besar dalam cara pandang masyarakat terhadap gender dan relasi kekuasaan.

Hubungan antara Teori Mobilitas Sosial dan Interaksionisme Simbolik dengan Analisis Faktor Determinan Pelaku pelecehan terhadap perempuan

Pelecehan seksual terhadap perempuan sering kali merupakan manifestasi dari sejumlah faktor yang saling berinteraksi, baik dari sisi individu maupun sosial budaya. Dua teori yang relevan untuk menganalisis penyebabnya adalah Teori Mobilitas Sosial dan Teori Interaksionisme Simbolik. Keduanya memberikan perspektif berbeda mengenai bagaimana dinamika sosial dan simbolik membentuk perilaku, termasuk pelecehan seksual. Faktor sosial budaya, biologis, dan status sosial individu turut berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual.

Norma sosial yang menganggap perempuan sebagai objek seksual merupakan salah satu penyebab utama pelecehan seksual. Masyarakat sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat yang memandang mereka sebagai pihak yang pasif, yang harus menerima perhatian seksual. Padahal, perhatian tersebut sering berujung pada pelecehan seksual. Karliana dan Prabowo (2014) menjelaskan bahwa perhatian kepada perempuan sering dianggap sebagai bentuk sanjungan, padahal banyak perempuan yang merasa terganggu dan terhina saat mengalami pelecehan seksual.

Pandangan ini mengarah pada sistem patriarki yang mendukung dominasi laki-laki. Laki-laki dalam masyarakat patriarkal merasa memiliki hak untuk mendominasi perempuan, sementara perempuan diharapkan untuk tetap pasif agar tidak mendapat konsekuensi sosial yang negatif (Ahyun et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial yang memperkuat dominasi laki-laki berperan besar dalam menciptakan ketidakberdayaan perempuan di hadapan pelecehan seksual.

Selain faktor sosial budaya, faktor natural atau biologis juga dianggap memengaruhi terjadinya pelecehan seksual. Ada anggapan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi daripada perempuan, yang menyebabkan mereka lebih cenderung melakukan tindakan seksual terhadap perempuan. Namun, ketika dorongan ini berubah menjadi pelecehan seksual, perempuan sering merasa terganggu dan terhina. Nanda et al. (2023) mengungkapkan bahwa pandangan ini bertentangan dengan harapan bahwa perempuan seharusnya merasa tersanjung atas perhatian seksual. Pemahaman ini diperburuk oleh konsumsi konten pornografi yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual yang lemah dan mudah dikuasai.

Di dalam teori interaksionisme simbolik, pelaku pelecehan seksual membentuk persepsi mereka tentang perempuan melalui simbol-simbol yang ada dalam media. Akibatnya, perempuan dipandang sebagai objek yang bisa dikuasai, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya pelecehan seksual (Karliana & Prabowo, 2014).

Selain itu, paparan konten pornografi memperburuk sikap pelaku, menjadikan pelecehan seksual sebagai tindakan yang dianggap normal atau diterima (Sari, 2023).

3. Teori Mobilitas Sosial dan Dampaknya terhadap Perilaku

Teori Mobilitas Sosial, yang dikemukakan oleh H. Edward Ransford, juga dapat menjelaskan peran status sosial dalam terjadinya pelecehan seksual. Ransford menyatakan bahwa perubahan status sosial, baik itu naik, turun, atau tetap, memengaruhi perilaku individu (Shindita & Mukaromah, 2020). Di dalam hal ini, individu dengan status sosial rendah yang memperoleh posisi lebih tinggi sering kali merasa lebih berkuasa dan berhak mendominasi, yang dapat mengarah pada perilaku pelecehan seksual.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana status sosial memengaruhi kekuasaan dan pengambilan keputusan, termasuk tindakan terhadap perempuan. Individu yang sebelumnya tidak memiliki kekuasaan kini merasa memiliki hak untuk melakukan tindakan dominasi. Dengan demikian, status sosial berkontribusi pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual.

4. Teori Interaksionisme Simbolik dan Perilaku Sosial

Teori Interaksionisme Simbolik, yang dijelaskan oleh George Herbert Mead, menunjukkan bagaimana simbol-simbol sosial membentuk makna dalam interaksi sosial (Pitaloka & Putri, 2021). Dalam kasus pelecehan seksual, simbol-simbol yang terbentuk melalui pandangan dominasi laki-laki terhadap perempuan memperkuat keyakinan bahwa perempuan adalah objek yang bisa dikuasai.

Mead menjelaskan bahwa interaksi sosial melibatkan pemberian makna terhadap simbol-simbol yang muncul. Di dalam hal ini, perilaku pelecehan seksual sering dianggap sebagai tindakan yang normal oleh pelaku, meskipun korban merasakan dampak yang sangat berbeda. Simbol-simbol sosial ini mengarah pada pemikiran bahwa perempuan seharusnya menerima dominasi laki-laki. Maka dari itu, sikap seperti ini dapat memperburuk perilaku buruk terhadap perempuan.

Melalui analisis berdasarkan faktor sosial budaya, biologis, dan teori-teori terkait, jelas bahwa pelecehan seksual bukan hanya permasalahan individu, tetapi juga akibat ketimpangan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Norma sosial yang mendukung dominasi laki-laki, faktor biologis yang memengaruhi persepsi perilaku, serta status sosial yang memengaruhi tindakan dominasi, semua berperan dalam tingginya angka pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan tentang kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Edukasi semacam ini dapat menjadi langkah awal untuk mengubah pola pikir masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan

Solusi Pencegahan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah masalah yang serius dan memerlukan respons dari berbagai pihak untuk mencegahnya. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual termasuk pendidikan seksualitas, pengawasan orang tua, komunikasi yang baik, dan menciptakan lingkungan yang aman.

1. Pendidikan Seksualitas

Pendidikan seksualitas memainkan peran yang sangat besar dalam pencegahan kekerasan seksual di masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan nilai-nilai, sikap, dan pengetahuan tentang hubungan sosial, tetapi juga berfungsi untuk melindungi individu dan membekali mereka dengan kemampuan untuk menghormati diri sendiri serta orang lain. Pendidikan seksualitas mencakup berbagai aspek, seperti biologis, fisik, psikologis, sosial budaya, dan spiritual. Hal ini berkontribusi pada perilaku individu yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sosial mereka (Yafie, 2017).

Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan (Kurnianingsih, 2003). Pendidikan seksualitas yang memadai akan membantu individu mengenali batasan yang perlu dihormati, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

2. Pengawasan Orang Tua

Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Mereka perlu lebih perhatian terhadap pergaulan anak-anak, terutama dalam penggunaan internet. Pergaulan yang buruk bisa berdampak negatif bagi perkembangan anak, sementara pengawasan penggunaan internet menjadi sangat penting mengingat banyaknya konten pornografi yang mudah diakses oleh anak-anak.

Pergaulan yang cenderung negatif tentunya akan membawa dampak yang negatif juga terhadap anak (Putri et al., 2024). Oleh karena itu, orang tua harus aktif dalam mengawasi kehidupan anak-anak mereka dan memberikan arahan yang tepat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual.

3. Membangun Komunikasi yang Baik

Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak juga menjadi salah satu kunci pencegahan pelecehan seksual. Ketika anak merasa nyaman dan aman untuk berbicara, mereka akan lebih mudah untuk melaporkan jika mereka mengalami kekerasan seksual. Perempuan tidak bebas dari kekerasan, bahkan di rumah sendiri (Kurnianingsih, 2003)," sehingga anak-anak harus merasa bahwa mereka bisa berbicara bebas dengan orang tua mereka.

Dengan terciptanya komunikasi yang baik, anak-anak akan merasa lebih aman untuk berbagi pengalaman mereka tanpa takut dihukum atau diintimidasi. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual.

4. Lingkungan yang Aman

Menciptakan lingkungan yang aman adalah langkah penting dalam mencegah pelecehan seksual. Keamanan dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat. Keluarga yang aman membuat anak-anak merasa terlindungi dan nyaman. Lingkungan yang aman dapat diciptakan dari lingkungan terkecil yang dimiliki oleh seorang individu (Dewi & Lovita, 2024).

Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menanggulangi kekerasan seksual melalui kampanye dan tindakan preventif. Budaya yang tidak mentolerir kekerasan seksual akan menekan pelaku untuk berpikir ulang sebelum melakukan tindakan tersebut. Dampak organisasional meliputi turnover, menurunnya produktivitas

dan munculnya hambatan dalam perkawanan (Sodah, 2023). Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman tidak hanya melindungi individu, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Upaya pencegahan pelecehan seksual harus melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, pengawasan, komunikasi yang baik, dan penciptaan lingkungan aman. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman serta mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan setiap individu bisa merasa dihargai dan terlindungi dari pelecehan seksual dan bisa hidup dengan lebih aman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap studi kasus gender, khususnya terkait perempuan, menjadi masalah yang terus berulang, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan pelecehan. Sebagai contoh, studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Jakarta Timur mengungkapkan pentingnya memahami fenomena kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh pelaku bernama Maman, kekerasan seksual sering kali dipicu oleh dorongan seksual, situasi sepi, dan kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Sistem patriarki yang masih kuat turut berperan dalam hal ini, bersama dengan faktor biologis yang menganggap perempuan sebagai "objek" serta stereotipe sosial budaya yang melihat laki-laki sebagai pihak yang lebih aktif sementara perempuan harus bersikap pasif. Pandangan ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, yang berkontribusi pada tingginya angka kekerasan seksual dan dampak fisik serta psikologis yang dialami oleh korban.

Kekerasan seksual mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat, yang dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi. Fenomena ini berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban. Untuk mencegah hal ini terus berlanjut, beberapa solusi dapat diterapkan, seperti pendidikan seksualitas dasar, pendidikan keluarga yang lebih baik, terutama peran orang tua, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur, serta menciptakan lingkungan yang berkualitas, terutama dalam hal kesetaraan gender, keamanan, dan kenyamanan bagi perempuan.

Menurut kami, solusi untuk penanganan pelaku kekerasan seksual melibatkan evaluasi psikologis, terapi, rehabilitasi, dan, jika diperlukan, medikasi untuk mengatasi akar penyebab perbuatan tersebut dan mencegah terjadinya pengulangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, Ibu Dr. Ciek Julyati Hisyam, MM., M.Si, dan Bapak Abdul Rahman Hamid, SH., MH. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 4, yaitu saudara Benedictus Raditya Santoso, Muhammad Fauzil Adhim, Hernan Solari, Ilham Danu Prasetyo, Nasrani Nofati Waruwu, dan Roberto Dowansiba atas kontribusi dan perannya. Harapan kami, semoga hasil ini dapat berkontribusi untuk

mengurangi bahkan menghilangkan tindakan perilaku menyimpang, seperti pelecehan dan kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustanti, R. D., & Waluyo, B. KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 42-51.
- Ahyun, F. Q., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92-97.
- Alhakim, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115-122.
- Al Rahman, N. (2019). *Pelecehan seksual verbal pada mahasiswa berjilbab (Studi tentang pemaknaan pengalaman pelecehan seksual verbal bagi mahasiswa berjilbab di kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76-90.
- Dewi, R. A. K., & Lovita, A. (2024). Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 8(1), 13-24.
- Dwiyanti, F. (2014). *Pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja (studi kasus kantor satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*. University of Indonesia.
- Facio, A. (2013). What is patriarchy. *Translated from the Spanish by Michael Solis*, 1-5.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Harrington Conner, D. (2014). Financial freedom: Women, money, and domestic abuse. *William & Mary Journal of Race, Gender, and Social Justice*, 20(2), 339-348. William & Mary Law School Scholarship Repository.
- Karlina, A., & Prabowo, H. (2014). Pelecehan seksual di angkutan krl ekonomi dari perspektif pelaku. In *The 17th FSTPT International Symposium, August* (pp. 22-24).
- Kurnianingsih, S. (2003). Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. *Buletin Psikologi*, 11(2).
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12-12.
- Nanda, N. D., Ikhwana, B. A., & Az-Zahra, J. (2023). Pemicu Pelecehan Seksual pada Perempuan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 289-296.
- Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90-114.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap

- Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17-17.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- Rahman, A. (2024). Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender. *Jurnal Perempuan*, 29(1), i-x.
- Roem, A. M., Aituru, Y. P., Rumalean, Z. Z., & Muslim, M. (2024). Pembaruan Hukum Perdata sebagai Upaya Meningkatkan Keadilan Gender. *UNES Law Review*, 6(3), 9469-9478.
- Sari, Afna Fitria. (2023). FAKTOR DAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA TANJUNGPINANG. *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*, 7(2), 146-163.
- Shindita, N., S., & Mukaromah. (2020). Etika Komunikasi dan Interaksionisme Simbolik Pada Anggota Akun Draft Sms di Media Sosial. *Jurnal KOMUNIKATIF*, 9(1), 74-92.
- Sinaga, H. (2022). MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 188-210.
- Siregar, D. S. (2024). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 40-58.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327-2336.
- Sopariyah, M., & Khairunnisa, A. (2024). BUDAYA PARTIARKI DAN KETIDAKADILAN GENDER DI KEHIDUPAN MASYARAKAT. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7), 3.227-3.232.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.
- Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(3), 288-310.
- Swari, P. R. (2023). Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekspresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213-218.
- Tutrianto, R., & Nizar, S. (2021). Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R). *SISI LAIN REALITA*, 6(2), 17-32.
- Umniyyah, Z. (2021). Kekerasan berbasis gender: Belenggu patriarki terhadap perempuan dalam novel Tempurung karya Oka Rusmini. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1), 22-29.
- Vranjes, I., Farley, S., & Baillien, E. (2020). Harassment in the digital world: Cyberbullying. In *Bullying and Harassment in the Workplace* (pp. 409-433). CRC Press.
- Wall, E. (Ed.). (1992). *Sexual harassment: Confrontations and decisions* (Vol. 92). New York. Prometheus Books.
- Watson, S. (2023). Taking on the world: Tackling gender-based violence in the online space. *Papers from the British Criminology Conference*, 22, 8–23. British Society of Criminology.